

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

APBD DKI Siap Diterapkan Januari 2020

APBD DKI Jakarta untuk satu tahun ke depan telah tuntas pembahasan dan revisinya di Kementerian Dalam Negeri. Kurang dari sepekan ke depan, APBD yang baru siap diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 siap diterapkan mulai Januari 2020 setelah tuntasnya seluruh proses pembahasan. Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan perubahan pada mata anggaran, hanya memberikan beberapa revisi yang tidak bersifat prinsip.

"Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Suharti mengatakan, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri hanya memberikan penyesuaian detail-detail di beberapa kegiatan. "Januari sudah langsung jalan," katanya, Kamis (26/12/2019), di Jakarta.

Evaluasi pada detail itu di antaranya koreksi pada penggeseran kode rekening dan kegiatan fisik, di antaranya pembangunan aspal di kompleks-kompleks yang bukan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi kegiatan fisik di lokasi di luar aset itu sudah dijelaskan sebagai program hibah.

Tanpa revisi berarti dari Kementerian Dalam Negeri, besaran APBD DKI 2020 tetap sama seperti pembahasan terakhir Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 87,9 triliun.

Mata anggaran yang sempat menuai perdebatan pun tak berubah, seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19,8 miliar, meskipun Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edhi Marsudi sudah memutuskan pengurangan jumlah anggota TGUPP menjadi 50 orang dari jumlah yang diusulkan semula 67 orang.

Kurang dari target

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi publik.bapedadki.net, serapan anggaran belanja APBD DKI Jakarta 2019 hingga 26 Desember 2019 baru sebesar 79,5 persen dari target 83,42 persen. Serapan APBD DKI Jakarta 2018 berkisar 81,95 persen dari target 83 persen.

Serapan terendah tahun ini terdapat di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota sebesar 44 persen untuk realisasi keuangan dan 54 persen untuk realisasi fisik. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi keuangan sebesar 55 persen dan fisik 47 persen.

Untuk satuan kerja perangkat daerah, serapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota mampu mencapai realisasi fisik 67,8 persen dengan realisasi

keuangan hanya 48 persen. Adapun Dinas Sumber Daya Air baru mencapai realisasi fisik 60,5 persen dengan realisasi keuangan 54,4 persen.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf menyampaikan, kendala utama adalah pembebasan lahan yang membutuhkan waktu dan proses panjang untuk pemeriksaan keabsahan surat-surat kepemilikan.

"Di lapangan banyak masalah fisik yang perlu dikoordinasikan. Kemarin juga mulai skedul paket agak lambat sehingga fisik sampai 15 Desember kita baru selesai," katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, catatan APBD DKI selama ini adalah realisasi yang rendah pada awal tahun dan baru meningkat pada akhir tahun karena lemahnya perencanaan pengerjaan fisik. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya serapan maupun tidak optimalnya realisasi fisik.

Ia menilai perencanaan pelaksanaan fisik lemah pada tahap perencanaan. "Kendala itu banyak terjadi, misalnya untuk renovasi gedung. Pembebasan aset seharusnya dilakukan sejak awal sehingga pekerjaan fisik langsung bisa dilakukan pada awal tahun," ujar Taufik. (IRE)